

## Geliat Politik Identitas di Kota Manado

**Muhammad Irfan Syuhudi**  
Balai Litbang Agama Makassar  
Jln. A.P.Pettarani No. 72 Makassar  
[irfansyuhudi@gmail.com](mailto:irfansyuhudi@gmail.com)

Diterima Redaksi 27 Mei, diseleksi 22 September, dan direvisi 19 Oktober 2016

### Abstract

*This paper aims to describe the background of the establishment of identity politics in the city of Manado and how the identity politics develops in the city until today. The selection of informants was undertaken purposively. They are the board members who are still active and have ever been involved in the group identity, religious leaders, and academics, know the context of the research in the city of Manado. Data collection was done through interviews, observation, documentation, the use of internet to search for websites informing the context of the study.*

*The research findings show that identity politics came to the fore in the beginning of the reform era, which gave birth to the making of the group's identity, among others are; Brigade Manguni Indonesia, Legium Christum, Laskar Manguni, Makapetor (Society Kawanua lover of tolerance), and Militia Waraney. All these identity groups represent the indigenous ethnic group of Minahasa as the majority in the city. The development of these identity groups in Manado continues to evolve significantly. Besides, these groups turned out to have a hidden agenda to meet the interests of the group in politics and economics. Identity politics in Manado is fluid, not rigid, and does not trigger inter-religious conflicts to occur, although the Christian Minahasa is the dominant group identity.*

**Keywords:** Manado, Minahasa Ethnic, Identity Politics, Group Identity, Harmony.

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan latar belakang berdirinya politik identitas di Kota Manado dan bagaimana perkembangan politik identitas di kota tersebut sampai saat ini. Penentuan informan dilakukan secara purposif, yakni pengurus yang masih aktif dan pernah terlibat di dalam kelompok identitas, tokoh agama, dan akademisi, yang mengetahui konteks penelitian di Kota Manado. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelusuran lewat internet terkait konteks tulisan.

Hasil penelitian menunjukkan, politik identitas mulai berkembang di era reformasi, yang kemudian melahirkan beberapa kelompok identitas, antara lain, Brigade Manguni Indonesia, Legium Christum, Laskar Manguni, Makapetor (Masyarakat kawanua pencinta toleransi), dan Milisi Waraney. Semua kelompok identitas tersebut merepresentasikan adat Minahasa sebagai etnis mayoritas di kota ini. Perkembangan kelompok identitas di Manado berkembang signifikan. Di balik terbentuknya kelompok identitas itu, mereka ternyata memiliki agenda tersembunyi untuk memenuhi kepentingan kelompoknya di panggung politik dan ekonomi. Politik identitas di Manado bersifat cair, tidak kaku, serta tidak mengancam terjadinya konflik antarumat beragama, meskipun yang mendominasi adalah kelompok identitas berbasis Minahasa-Kristen.

**Kata kunci:** Manado, Minahasa, Politik Identitas, Kelompok Identitas, Kerukunan.

## Pendahuluan

Era reformasi nyaris membawa perubahan total hampir di segala lini kehidupan di Indonesia. Salah satu bentuk “kebebasan” di era reformasi adalah lahirnya beberapa kelompok identitas di berbagai daerah. Di era ini pula, kelompok identitas mulai menemukan momentumnya. Mereka muncul dengan membawa bendera serta mengusung ideologi yang berbeda-beda, seperti, agama, etnis, dan budaya sub kultur (*pop culture*). Robert Putnam (Sen, Amartya: 2016:5), menyatakan, kesamaan identitas dalam satu komunitas sosial dapat membuat kehidupan di komunitas tersebut berjalan jauh lebih baik. Pembentukan kelompok identitas dapat pula menyebabkan kekerasan fisik, kekerasan simbolik, serta kekerasan semiotik, yang dilakukan oleh kelompok lain terhadap kelompok identitas lainnya.

Membicarakan kelompok identitas tak bisa dipisahkan dari tokohnya, Michael Foucault dan Stuart Hall, yang banyak mengupas mengenai teori-teori identitas. Inti teori identitas adalah membicarakan bagaimana sebuah identitas tertentu bisa menentukan nasibnya sendiri (*self determination*), atau dalam bahasa Agness Heller (2007), semacam gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan sebagai satu kategori politik yang utama.

Kelompok identitas telah ada sebelum Orde Baru. Namun, selain jumlahnya minim, mereka juga masih muncul dengan wajah malu-malu atau menyembunyikan identitasnya (*hidden identity*). Hal itu bisa dimaklumi, karena pemerintah saat itu sangat menentang keras kehadiran kelompok identitas, terutama yang tidak sejalan dengan kerangka berpikir pemerintah, sehingga kerap dijadikan musuh negara. Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh adalah contoh kelompok identitas yang resisten terhadap negara. Keduakelompok

itu hingga kini masih menggaungkan pemisahan diri dari Negara Indonesia dengan mendirikan negara baru.

Konflik yang mengatasnamakan identitas kelompok tertentu satu per satu mulai bermunculan sejak reformasi di Indonesia. Misalkan, di Ambon dan Poso (konflik bernuansa agama) serta antara Dayak versus Sampang, Madura (konflik etnis) di Kalimantan Timur (Kaltim). Penilaian terhadap lahirnya kelompok identitas pun beragam. Ada yang menilai negatif dan juga positif. Penilaian bernuansa negatif melahirkan intoleransi, kekerasan, dan ingin keluar dari negara Indonesia. Sementara dari sisi positif memperjuangkan representasi politik yang adil serta distribusi ekonomi yang adil dan merata, termasuk memperjuangkan kaum minoritas.

Dalam konteks Manado, politik identitas tidak berdampak kepada pecahnya konflik antarumat beragama. Meskipun terdapat kontestasi di antara kelompok identitas untuk memenuhi kebutuhan kelompoknya dan terkesan “menyingkirkan” etnis lain (non Minahasa), namun sejauh ini belum sampai kepada meletusnya konflik berdarah-darah. Hal ini ditegaskan melalui beberapa penelitian yang mengemukakan, kondisi kerukunan umat beragama di Manado dan Sulawesi Utara, tergolong bagus. Hasil penelitian tersebut dilakukan oleh Tim Peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Agama (Balitbang) Makassar (2011), Syamsurijal (2012), dan Irfan Syuhudi (2015).

Dalam sebuah risetnya terkait Indeks Kerukunan Umat Beragama di Manado pada 2011, Tim Peneliti Balitbang Agama Makassar menemukan, kerukunan umat beragama di Manado masuk kategori sangat baik, yaitu 0,75 persen. Demikian pula, Syamsurijal dan Irfan Syuhudi, yang masing-masing meneliti di Bolaang Mongondow dan Manado, menemukan, kerukunan antarumat beragama di dua

daerah tersebut tergolong bagus. Namun, penelitian ini memberi catatan penting, bahwa kerukunan yang tercipta di Sulut sebenarnya kerukunan simbolik atau kerukunan pasif. Mereka masih dalam tataran “dirukunkan”, bukan rukun atas inisiatif sendiri. Mereka akhirnya rukun, karena ketika terjadi keributan atau timbul gejala konflik, ada lembaga resmi dan informal yang “memaksa” untuk rukun, yakni pemerintah setempat, tokoh agama, aparat keamanan, serta Badan Kerjasama antarumat beragama (BKSAUA) dan FKUB. Dalam hal ini, pemerintah setempat dan lembaga informal memang selalu terlihat berperan aktif menyikapi berbagai persoalan yang bisa mengancam lahirnya perpecahan.

Tulisan ini hanya fokus kepada gerakan politik identitas berbasis etnis dan agama, karena mayoritas etnis dan agama di Manado adalah Minahasa-Kristen. Penelitian ini mengajukan dua pertanyaan, yakni latar belakang berdirinya politik identitas dan perkembangan gerakannya di Manado, serta keterkaitan politik identitas dengan kerukunan antarumat beragama di kota ini. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan latar belakang berdirinya politik identitas dan perkembangan gerakannya di Manado, serta mendeskripsikan kaitannya dengan kerukunan antarumat beragama.

## Kajian Teoritik

### *Identitas dan Politik Identitas*

Identitas dalam tulisan ini bukanlah sesuatu yang esensi dan melekat. Ia merupakan satu produksi yang berlangsung terus menerus (Stuart Hall, dalam Woodward, ed., 1997:51). Identitas selalu berproses dan selalu membentuk di dalam representasi diri seseorang, yang menandakan otoritas dan keaslian identitas dalam konsep “identitas kultural” menjadi tidak ada, sehingga seseorang dimungkinkan memiliki

identitas lebih dari satu, yang oleh Peter J. Burke dan Stets, disebut *multiple identity* (Burke & Stets, 2009).

Identitas ditandai sebagai sesuatu yang berbeda dengan yang lain dalam bentuk representasi simbolik maupun sosial (Woodward dalam Woodward (ed.), 1997:8-15). Identitas bukanlah esensi yang melekat, maka ia dapat dibentuk, dibangun, dan kemudian diperebutkan, atau malah dipertentangkan. Bahkan, identitas juga dapat diubah, dipengaruhi, dilupakan, atau ditinggalkan di dalam sebuah wacana. Dari proses pembentukan identitas seperti itulah, ia kemudian ditafsirkan sebagai sebuah budaya milik bersama, serta dimiliki secara bersama-sama oleh orang yang memiliki sejarah dan asal-usul yang sama. Dalam kaitan ini, Amartya Sen (2016:3-4), menyatakan, “*Rasa memiliki suatu identitas bukan hanya bisa menjadi sumber lahirnya kebanggaan dan kebahagiaan, melainkan pula sumber tumbuhnya kekuatan dan kepercayaan diri... Identitas juga bisa memicu pembunuhan dan membuat orang mati sia-sia.*”

Identitas, menurut pandangan Michael Foucault, tidak bisa dilepaskan dari perbincangannya tentang subjek. Keduanya terkait erat dan tidak dapat dipisahkan. Jika subjektivitas adalah kondisi sebagai seorang pribadi dan bagaimana menjadi seorang pribadi itu, maka konsepsi untuk meyakini tentang diri kita inilah yang kemudian disebut identitas. Bagi Foucault, subjektivitas adalah produksi diskursif kekuasaan, yang mengatur apa yang dapat dikatakan tentang orang dalam kondisi sosial dan budaya tertentu. Dalam pemahaman identitas, subjek atau kelompok subjek bisa memperjuangkan identitas mereka. Selanjutnya, subjek dimungkinkan membentuk dan memproduksi sendiri tentang siapa dirinya, dan inilah yang disebut politik identitas (Robet dan Tobi, 2014, 156:160).

Sejarah menentukan nasib sendiri ini muncul dalam gerakan identitas di Amerika dan Eropa. Kauffman (1990), misalnya, menunjuk satu contoh tentang perjuangan mahasiswa anti kekerasan yang disebut The Student Nonviolent Coordinating Committee. Selain itu, isu politik identitas juga diperbincangkan oleh kelas sosial yang merasa tersingkirkan dalam negara dan masyarakatnya, seperti kelompok Gay, Queer, dan kelompok sub kultur *Punk*. Dengan basis isu inilah, *Queebac* di Kanada yang berbahasa Perancis berjuang dengan damai untuk memisahkan diri dari Kanada yang dominan berbahasa Inggris. Demikian halnya perjuangan Islam tipikal Louis Farrakhan (Muslim kulit hitam) dengan The Nation of Islam model Amerika Serikat (Syafii Maarif, 2010), yang juga berakhir dengan perdamaian manis.

### Politik Identitas di Indonesia

Politik identitas di Indonesia bermuara pada persoalan etnisitas, agama, dan ideologi politik (Syafii Maarif, 2010). Beberapa gerakan ini sudah muncul di akhir-akhir Orde Baru, tetapi kian menonjol pasca reformasi. Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Gerakan Papua Merdeka (GPM), Republik Maluku Selatan (RMS) dan Riau Merdeka, merupakan contoh dari politik identitas. Kelompok ini muncul untuk menggugat terhadap dominasi etnis dan proses distribusi ekonomi yang tidak adil.

Model operasional politik identitas di Indonesia diasumsikan dalam tiga bentuk, yaitu: pertama, politik identitas dimainkan dalam roda politik dan pemerintahan. Desentralisasi dimaknai tidak hanya sebagai wewenang mengatur secara otonom beberapa hal di daerah, tapi juga menjadi sarana untuk menunjukkan putra asli dan pendatang, serta pribumi dan non pribumi. Pada gilirannya gerakan ini menghilangkan

hak politik kelompok lainnya yang dianggap tidak asli. Kedua, pola politik identitas yang bergerak pada persoalan etnisitas. Gerakan ini memperjuangkan pengakuan terhadap etnisitas dan hak-hak komunalnya sebagai warga negara. Ketiga, pola gerakan identitas dalam wilayah agama yang digerakkan oleh kelompok mayoritas dengan kepentingan menyingkirkan kelompok minoritas yang dianggap menyempal atau menyeleweng.

Politik identitas berbasis ideologi politik cenderung mulai meredup, namun tidak demikian isu etnis dan agama. Kelompok identitas di Manado tidak hanya menguat dalam soal-soal etnis, tetapi juga agama. Bahkan, semua kelompok identitas di Manado sama-sama mengangkat etnis Minahasa sebagai etnis mayoritas di daerah ini. Musda Mulya, menyatakan, politik identitas di Indonesia kebanyakan direbut oleh kelompok dominan dan *mainstream* untuk menyingkirkan kelompok minoritas (Mulya, Musda, 2010:45). Gelombang politik identitas ini melahirkan kekerasan fisik, kekerasan simbolik, kekerasan semiotik, hingga kekerasan struktural.

### Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Manado selama 18 hari, pada Februari dan Maret 2016. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yang menurut Bogdan dan Taylor (Endraswara, 2006:85-86), merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sebagaimana lazimnya penelitian kualitatif, peneliti dalam hal ini sekaligus merupakan instrumen penelitian.

Pengumpulan data melalui wawancara dan observasi (Moleong, Lexy, 2010:174-202 dan Endraswara, Suwardi,

2006a:213-214), dan wawancara dilakukan dengan pengurus kelompok identitas di Manado (yang masih aktif dan sudah tidak terlibat), tokoh agama, dan akademisi, yang memahami tentang politik identitas di wilayahnya. Pengumpulan data juga melalui dokumentasi dan pencarian di internet terkait tema penelitian. Analisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen-dokumen, dan lain-lain. Setelah itu mereduksi data, memaparkan data, dan simpulan melalui pelukisan dan verifikasi (Endraswara, 2006:176).

## Pembahasan

### *Geografis dan Demografis*

Manado merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Secara administratif, Manado mengalami pemekaran kecamatan sejak 2014. Jika sebelumnya terdapat sembilan kecamatan, kini menjadi 11 kecamatan. Namun, jumlah kelurahan di Manado tidak mengalami perubahan, yakni 87 kelurahan/desa dengan luas wilayah sebesar 157,26 km<sup>2</sup>. Sementara itu, penduduk di Manado berjumlah 419.596 jiwa, dengan perincian laki-laki 210.706 jiwa dan perempuan, 208.890 jiwa.

### *Sosio-Religi Masyarakat*

Manado sejak dulu dikenal kebanyakan menganut Kristen. Mereka umumnya penduduk asli yang berasal dari beberapa etnis, seperti Minahasa, Tombulu, dan Sangir. Menurut beberapa informan, dari beragam etnis di Manado, Minahasa merupakan etnis terbanyak, yakni sekitar 70 persen, dan tersebar di semua kecamatan di Manado. Sisanya dihuni etnis lokal lainnya, seperti Bugis, Makassar, Jawa, Arab, Tionghoa, dan Batak. Sejak dulu hingga sekarang, etnis

Minahasa (Kristen) masih mendominasi hampir semua sektor, terutama politik dan birokrasi pemerintahan. Orang Minahasa selalu menempatkan diri sebagai “nomor satu” untuk posisi kepala daerah (gubernur dan walikota), dan kepala dinas di berbagai instansi pemerintah setempat dan vertikal.

Jumlah penduduk berdasarkan agama di Manado berdasarkan data tahun 2011 adalah Kristen (290.665 jiwa), Islam berjumlah 175.569 jiwa, Katolik, 30.275 jiwa, Buddha 6.436 jiwa, Hindu 2.592 jiwa, dan Khonghucu 600 jiwa. Sementara itu, tempat peribadatan di Manado berdasarkan BPS tahun 2015 adalah 597 gereja, 199 masjid dan 36 mushalla, empat pura, dan 18 vihara/TITD.

### *Lahirnya Kelompok Identitas di Nyiur Melambai: Bermuara dari Semangat Permesta*

Kelahiran kelompok identitas di Sulut dan Manado tak terlepas dari gerakan Perjuangan rakyat semesta atau Perjuangan Semesta, disingkat Permesta (1957-1961), yang merupakan gerakan militer di Indonesia. Perjuangan Permesta tidak mengatasnamakan kelompok identitas tertentu, serta tidak membawa nama agama atau etnis tertentu.

Gaung Permesta terasa lebih menguat di Manado ketimbang di daerah-daerah lain. Beberapa tokoh Islam lokal pun ikut bergabung bersama tokoh-tokoh lain yang kebanyakan beragama Kristen. Salah satunya, Kyai Haji Arifin Assegaf. Di zaman Permesta, kyai kharimastik keturunan Arab-Minahasa, Jawa, dan sangat disegani di Sulut hingga akhir hayatnya ini, sempat diangkat menjadi Kepala Staf Permesta di Maluku Utara (Sumampouw, Nono, 2015:62). Namun, gerakan Permesta sering diidentikkan sebagai gerakan orang Minahasa yang Kristen (Sumampouw, Nono, 2015:95).

Gerakan Permesta masih melekat kuat dalam ingatan warga lokal hingga hari ini. Untuk mengenang dan memelihara ingatan kolektif masyarakat lokal terhadap perjuangan Permesta, pemerintah setempat kemudian membangun patung Panglima Besar Angkatan Perang Permesta, Mayor Jenderal Alex Evert Kawilarang. Patung tersebut dibangun pada era Orde Baru, ditempatkan di *public space*, di Taman Kesatuan Bangsa (TKB) Manado. Simbol dalam bentuk tugu atau patung pahlawan Permesta ini sangat penting sebagai “jejak-jejak ingatan” (*memory trace*), yang berfungsi sebagai jembatan manusia di masa kini untuk memasuki masa silam. Hal ini jelas menjadi penanda (*signifier*), bahwa orang Minahasa di masa silam pernah berjiwa patriotik yang “berseberangan” dengan pusat dan berjuang demi menentukan nasibnya sendiri (*self determination*) (Tota, 2001, dalam Darmawan, Yusran, 2008:11).

Jejak-jejak ingatan masa lalu mengenai Permesta itulah, ditambah dengan jiwa militansi, sehingga ketika reformasi bergulir, beberapa kelompok identitas tersebut lahir. Pada 1998 ditandai sebagai periode awal untuk mewacanakan gagasan terkait komunitas adat dan etnis, sehingga pada Agustus 1999 dilaksanakan Kongres Minahasa Raya di Kota Tomohon, Sulut (Wawancara, Fendy Parengkuan, Sejarahwan Universitas Sam Ratulangi Manado, 10 Februari 2016, di Manado).

Kongres Minahasa Raya merupakan salah satu bentuk gagasan yang dilakukan tokoh-tokoh Minahasa untuk menyikapi politik nasional pada waktu itu sebagai marginalisasi kaum minoritas. Kongres Minahasa Raya termasuk salah satu ajang penting yang mempertemukan tokoh-tokoh Minahasa untuk membicarakan banyak hal, terutama masa depan daerahnya sendiri. Selama ini, Minahasa merasa sebagai

*double minority*, yaitu minoritas dari segi agama dan minoritas dari segi keetnisan, sehingga menyebabkan kelompok mereka terancam dan termarginalisasi. Edward Said (Piliang, Yasraf, 2004:283), menyatakan, gerakan resistensi politik lokal, baik dalam konteks politik maupun sosial budaya, merupakan wujud daya kritis baru masyarakat daerah, yang dipadukan dengan pemahaman baru tentang identitas. Ketika globalitas mengukung, atau ketika kekuatan nasional menjadi otoriter, yang keduanya cenderung melakukan politik hegemoni dan homogenisasi, penyamaan, penyeragaman, dan sebagainya, maka lahirlah antitesis baru, yakni menguatnya kekuatan lokal (Halim, Abdul, 2014:91).

#### *Perkembangan Politik Identitas: Identitas Ke-Minahasa-an yang Terpecah-Pecah, Dominasi, dan Diperebutkan*

Kelompok identitas yang paling populer dan memiliki anggota paling banyak adalah Brigade Manguni Indonesia (BMI). BMI, yang dibentuk pada 2002, merupakan kelompok identitas pertama dan tertua di daerah berjudul *Nyiur Melambai* ini. BMI memiliki cabang di seluruh Indonesia dan luar negeri, yaitu di Belanda, Malaysia, dan Brunei. Selain BMI, ada juga Laskar Manguni, Legium Christum, Makapetor (Masyarakat Kawanua Pecinta Toleransi), Milisi Waraney, Pisok, Waraney Wuaja, Milisi Kristi, dan Bantik. Bikhu Parekh (2008:218-219), menyatakan, kebanyakan orang terikat pada budaya, karena budaya memberikan jaringan dukungan, solidaritas, sumber daya moral dan emosional, serta perasaan yang mengakar. Orang-orang tersebut juga berkewajiban untuk memelihara dan mewariskan budaya yang dia anut. Apa yang dikatakan Parekh sebenarnya berlaku pula di Manado. Orang di Manado kerap kali terikat dalam satu identitas bersama, terutama etnis dan agama. Identitas etnis

(Minahasa) ini lantas menjadi sebuah arena yang diperebutkan ke dalam satu “payung” besar, yang kemudian terpecah-pecah menjadi beberapa bagian. Tak bertahan di satu kelompok, ia akan mencari atau membentuk kelompok lain yang baru, yang juga berbasis Minahasa.

Sebagai organisasi pertama dan tertua di Manado dan Sulut, BMI merupakan kelompok identitas yang dominan. Ia menjadi organisasi yang di kemudian hari melahirkan banyak organisasi berbasis Minahasa di Manado. Ibarat mentor, BMI menghasilkan banyak murid, sementara murid yang hengkang kemudian menjadi mentor di kelompok barunya. Laskar Manguni (LM) salah satu contohnya. LM adalah kelompok identitas yang terbentuk sekitar Februari 2016 di Manado. Sebagian orang di LM merupakan pentolan di BMI, yang terpaksa hengkang dan kemudian membentuk kelompok baru bernama LM.

Mengapa banyak yang tertarik membentuk organisasi berbasis (etnis) Minahasa? Sebagai etnis mayoritas di Sulut, Minahasa tentu saja menjadi ajang perebutan. Ia menjadi ajang kontestasi yang selalu diperebutkan oleh siapapun, termasuk oleh “orang luar” sekalipun. Di dalam “tubuh” ke-Minahasa-an, akses untuk memperoleh jejaring sosial, politik, dan ekonomi, akan mudah didapatkan.

Orang Minahasa mendominasi instansi pemerintahan dan politik di Sulut. Di tingkat provinsi dan kota, Gubernur Sulut dan Walikota Manado dipegang oleh orang Minahasa. Dalam bidang pemerintahan dan politik setelah reformasi bergulir, orang Minahasa selalu menempati posisi superior. Mereka tak ingin menjadi nomor dua di daerah sendiri. Dari sinilah kita mulai memasuki dan menyelami peranan beberapa kelompok identitas Minahasa. Kelompok identitas bisa dijadikan “pintu” untuk

menembus batas-batas lapisan struktural, dan juga mendekati atau didekati penguasa.

Secara personal, relasi di antara kelompok identitas tergolong harmonis. Mereka tidak saling bermusuhan meski berbeda organisasi. Dalam beberapa hal, mereka memang terlihat bersaing dan terpecah belah demi mendapatkan sumber ekonomi (proyek, dan lain-lain), atau pertarungan di panggung politik (melihat massa sebagai sumber daya politik). Di sini, mereka memang bersaing, saling menarik simpatik untuk menentukan siapa mendukung siapa. Akan tetapi, dalam beberapa hal juga, mereka saling membagi kekuasaan. Pada Pilkada Walikota Manado, BMI kelihatannya mendukung bakal calon *incumbent* Vicky Lumentut (yang akhirnya terpilih), sedangkan Laskar Manguni mendukung pasangan yang lain. Kelompok identitas di Manado/Sulut tidak diikat oleh primordial, agama atau etnis, melainkan diikat oleh kepentingan. Agama atau etnis suatu ketika bisa menjadi kepentingan, sehingga meskipun BMI terlihat dominan, mereka juga bersikap pragmatis dan tidak ingin menguasai semuanya. Terkadang, demi kepentingan bersama, dan paling sering saat menjelang pilkada, beberapa kelompok identitas terlihat bersatu untuk memenangkan pilihan politiknya. Di samping itu, hampir semua kelompok identitas terlihat akrab dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pandangan Pierre Bourdieu (1984:11-17), ini yang dinamakan *distinction*, atau pembedaan. Ia menjelaskan, dalam masyarakat ada penghakiman-penghakiman menyangkut selera, ekonomi, dan seni. Ada yang berselera tinggi dan berselera rendah. Proses *distinction* ini bergerak nyata, karena kebudayaan dalam masyarakat dibayangkan bersifat aristokrat, memiliki tingkatan. Bourdieu melihat masyarakat terpecah-belah dalam justifikasi selera

yang tak sepenuhnya akurat, lantaran ada titik yang membuat masyarakat bisa bersatu. Arena merupakan tempat untuk saling diperebutkan.

Relasi kelompok identitas dengan politisi dan pemerintah bersifat simbiosis mutualistik; sama-sama menguntungkan. Dalam istilah John Gaventa, dalam teori *Powercube* (Kubus Kekuasaan), mereka menggunakan “Kekuasaan yang Tersembunyi (*Hidden Power*)”, untuk kepentingan pribadi, kekuasaan, dan *privilege*, yang menjadi alat penguasa untuk mempertahankan *status quo* (Halim, Abdul, 2014:61-67), atau mengincar kekuasaan. Meskipun etnis Minahasa Kristen yang mendominasi hampir semua kelompok identitas di Manado, namun seketat apapun persaingan dan perebutan dalam sebuah arena, tetap masih menyisakan satu ruang untuk kompromistik, sehingga tak mengherankan melihat relasi sosial di antara semua identitas bisa saling berbaur.

#### *Politik Identitas dan Kaitannya terhadap Kerukunan Umat Beragama*

Tempat tinggal atau pemukiman penduduk di Manado tidak lagi berdasarkan segregasi berdasarkan agama dan etnis. Memang, saat ini masih ada nama perkampungan berdasarkan etnisitas di Manado. Misalkan Perkampungan Arab, Perkampungan Ternate, Perkampungan Tionghoa, Perkampungan Bugis Makassar, dan sebagainya. Hanya saja, penduduk yang menetap di perkampungan tersebut tidak lagi merujuk kepada etnisitas seseorang. Orang Bugis, misalnya, tidak dilarang untuk menetap di Perkampungan Arab. Penduduk lokal dan kaum migran bebas memilih dan menetap sesuai keinginan mereka. Tidak ada larangan bagi orang Islam untuk memilih tempat tinggal di lingkungan yang penduduknya

mayoritas agama lain. Agama lain pun tidak melakukan intimidasi atau kekerasan simbolik terhadap tetangga yang berlainan agama dengan mereka.

Kepala Kemenag Kota Manado, Lilie Rasmana, merasakan betul suasana multikultural di Manado. Ia, yang dulunya belum pernah berakrab-akrab dengan orang berbeda agama, kini malah hidup rukun damai dan bertetangga dengan agama lain. Lilie, yang merupakan orang Sunda, menilai, orang Manado itu terbuka, ramah, dan familiar. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab mengapa daerah ini rukun dan damai. Berikut penuturan Lilie:

*“Saya bertetangga dengan orang Kristen, Buddha, Hindu, dan Katolik. Kami akrab satu sama lain. Kalau ada tetangga yang sakit dan kedukaan (meninggal), kami saling mengunjungi. Bahkan, kami sering memberi bantuan dana kepada tetangga yang sakit tanpa melihat etnis dan agama mereka. Pada saat hari raya, kami juga saling bersilaturahmi.”* (Wawancara, Lilie Rasmana, di Kantor Kemenag Kota Manado, 30 September 2015)

Menurut Lilie, ia bertetangga dekat dan melakukan interaksi dengan orang yang berlainan agama selama di Manado. Mereka juga saling tolong menolong apabila ada tetangga yang membutuhkan bantuan. Berkat perhatiannya terhadap pembinaan dan pelayanan umat beragama, serta kegigihannya memelihara dan merawat kerukunan umat beragama di Manado, Lembaga Prestasi Indonesia-Dunia (Leprid) menganugerahi Lilie penghargaan tahun 2015.

Dalam hubungan beragama dan berorganisasi keagamaan, orang Manado cenderung toleran. Mereka menerima dengan tangan terbuka agama dan ideologi yang berbeda dengan mereka. Beberapa organisasi trans-nasional seperti Ahmadiyah, Jamaah Tabligh, dan



Syiah, yang terdapat di Manado merasa tenang menjalankan aktivitas ritualnya di tengah masyarakat. Agama lain (non Islam) pun tidak pernah merasa terusik dengan kehadiran kelompok keagamaan trans-nasional ini. Penyelenggara Syariah Kemenag Kota Manado, Mas'udah Hafid, menyatakan, orang di Manado sebenarnya bersikap apatis terhadap kelompok keagamaan. Alasannya, sepanjang kelompok keagamaan tersebut tidak mengusik ketenangan, ketentraman, dan ekonomi masyarakat, mereka tetap mempersilakan dan bersikap *welcome*. Namun, apabila kelompok keagamaan tersebut dianggap mengganggu ketenangan dan dapat memicu keretakan kehidupan antarumat beragama, maka masyarakat akan mengusir kelompok tersebut dari Manado. Hal ini pernah dialami Front Pembela Islam menjelang pemilihan kepala daerah di Kota Bitung pada 2013. Masyarakat menilai, ormas ini sengaja memprovokasi warga untuk tidak memilih kepala daerah non muslim dengan membagi-bagikan selebaran di jalan raya. Aksi FPI ini tentu saja membuat warga dan kelompok identitas di Manado, termasuk ormas Islam sendiri, menjadi marah. Tindakan FPI dinilai bisa mengancam kerukunan antarumat beragama.

Selain itu, yang terpenting, pemuka agama, pemerintah setempat, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan lembaga informal selalu terlihat aktif menjaga dan melestarikan kerukunan antarumat beragama di daerah ini. Kontribusi media lokal pun sangat besar. Mereka sangat aktif mempromosikan kerukunan antarumat beragama. Ketika terjadi perkelahian di suatu daerah, media lokal selalu mengedepankan perdamaian dan menghindari berita-berita yang bernada provokatif.

## Penutup

Kelompok identitas di Manado umumnya terbentuk setelah era reformasi bergulir, tahun 1999. Perbincangan mengenai kelompok identitas mulai menjadi perbincangan serius ketika tokoh-tokoh Minahasa menggelar Kongres Minahasa Raya di Kota Tomohon, Sulut, Agustus 1999. Kongres ini membicarakan bagaimana Minahasa akan menentukan masa depannya sendiri, atau menentukan nasibnya sendiri (*self determination*), dan tidak ingin lagi tergantung oleh kekuasaan pusat. Meski begitu, kelahiran kelompok identitas di Manado, sejatinya mengikuti jejak perjuangan dari semangat Permesta (1957-1961), yang menguat di Manado.

Kelompok identitas pertama di Manado adalah BMI, yang terbentuk pada 2002. BMI di awal berdirinya ingin mengasosiasikan diri sebagai organisasi Kristen, yang ditujukan untuk menyaingi maraknya berdiri organisasi Islam di awal 2000-an. Selain BMI, kelompok identitas lain di Manado adalah Legium Christum, Makapetor, Laskar Manguni, Milisi Waraney, dan lain-lain, yang kesemuanya berbasis Minahasa dan Kristen. Meski begitu, relasi sosial di antara kelompok identitas tersebut tidak kaku dan menegangkan. Pada saat tertentu, mereka memang terlihat saling berkontestasi, terutama di arena politik dan ekonomi. Tetapi, di sisi lain, relasi sosial mereka kelihatan mencair dalam kehidupan sehari-hari.

Relasi antarumat beragama di Manado berlangsung cair. Hampir tidak ada lagi jarak di antara mereka di dalam pergaulan sehari-hari. Pemukiman penduduk juga tidak lagi berdasarkan segregasi berdasarkan agama dan etnis. Namun begitu, kerukunan antarumat beragama di Manado masih bersikap kerukunan simbolik, pasif, dan bermuatan politis.

### Daftar Pustaka

- Tim Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, *Indeks Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi Utara*, Laporan Penelitian, Makassar, 2011.
- Bourdieu, Pierre, *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*, Cambridge, Massacushetts, Harvard University Press, 1984.
- Burke, Peter J & Jan E.Stets.2009. *Identity Theory*. New York : Oxford University Press.
- Darmawan, Yusran, *Antropologi, Ingatan, dan Kesejarahan (Orang Buton M e m a k n a i Tragedi PKI 1969)*, Tesis Magister Program Pascasarjana Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- Endraswara, Suwardi, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan. Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2006.
- Endraswara, Suwardi, *Metode Penelitian Kebudayaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006a.
- Halim, Abdul, *Politik Lokal, Pola Aktor, & Alur Dramatikalnya (Perspektif Teori Powercube, Modal, dan Panggung)*, LP2B, Yogyakarta, 2014.
- L.A. Kauffman, *The Anti Politic of identity*, Social Review No 1, Vol.20 (Jan-March 1990).
- Maarif, Syafii, “Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme di Indonesia” dalam *Politik Identitas dan Masa depan Pluralisme Kita*, Penyunting: Ihsan & Samsurizal, PUSAD, Jakarta, 2010.
- Moleong J, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010.
- Mulia, Siti Musda, “Politik Identitas Ancaman terhadap Masa Depan Pluralisme di Indonesia” dalam *Politik Identitas dan Masa depan Pluralisme Kita*, Penyunting: Ihsan & Samsurizal, PUSAD, Jakarta, 2010.
- Parekh, Bikhu, *Rethinking Multiculturalism, Keberagaman Budaya dan Teori Politik*, Kanisius, Yogyakarta, 2008.
- Piliang, Yasraf Amir, *Dunia yang Dilipat, Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan*, Jalasutra, Yogyakarta, 2004.
- Robert, Robertus, dan Tobi, Hendrik Boli, *Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan, dari Marx sampai Agamben*, Marjin Kiri, Tangerang, 2014.
- Sen, Amartya, *Kekerasan dan Identitas*, Marjin Kiri, Tangerang, 2016.
- Sumampouw, Nono S. A., *Menjadi Manado, Torang Samua Basudara, Sabla Aer, dan Pembentukan Identitas Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.
- Syamsurijal, *Sisi Gelap Toleransi Beragama di Sulawesi Utara (Menyingkap Problem Kerukunan Beragama) di Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara dan Kotamobagu*, Jurnal Al-Qalam, Volume 18, Nomor. 1 Januari - Juni, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, 2012.

Syuhudi, Muhammad Irfan, *Penyuluh dan Pengelolaan Kerukunan di Kota Manado*, Laporan Penelitian, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, 2015.

Woodward, K, Motherhood, "Identities, Meanings and Myths' dalam *Identity and Difference* K. Woodward (ed), London and Thousand Oaks, CA, Sage, 1997.